

UPAYA PELUCUTAN SENJATA NUKLIR KOREA UTARA OLEH AMERIKA SERIKAT 2016 – 2019

Mohammad Jody Kusuma

Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

JL. Dipatiukur 112 Kota Bandung Indonesia

E-mail : kusumajody@gmail.com

Abstract

In 2002 President George Bush said that North Korea was an "axis of evil". Shortly after the Axis of Evil stamp was given to North Korea, in December 2002, North Korea announced it would reactivate a nuclear facility at Yongbyon. Subsequently, in January 2003 North Korea withdrew from the Non-Proliferation Treaty (NPT). The United States showed its disapproval by establishing a regime called the Proliferation security initiative (PSI). Although the United States has expressed its disapproval of North Korea's nuclear weapons development program, North Korea continues to develop nuclear weapons. North Korea has carried out six nuclear weapons tests. Starting from nuclear trials in October 2006, June 2009, February 2013, January 2016, September 2016, and September 2017. North Korea which unilaterally withdrew from the NPT, encouraged the United States to make efforts to disarm nuclear weapons against North Korea. The concept of security dilemma is used to analyze the situation of the dilemma that the United States and North Korea have in taking their policies. This study aims to find out how the United States's efforts in North Korea's nuclear disarmament? Are policies taken by the United States and North Korea on nuclear issues? The method used in this research is qualitative method. In the results of this study data obtained on the national interests of the United States in North Korea's nuclear disarmament, policies taken by the United States and North Korea's response. In accordance with the Donald Trump America First campaign, the US national interests and policies taken during Donald Trump's leadership were obtained.

Keywords: North Korea, USA, Nuclear

Abstrak

Pada tahun 2002 Presiden George Bush menyampaikan bahwa Korea Utara adalah "axis of evil". Tidak lama setelah cap *Axis of Evil* diberikan pada Korea Utara, pada bulan Desember tahun 2002, Korea Utara mengumumkan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir di Yongbyon. Selanjutnya, pada Januari 2003 Korea Utara menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir / *Non Proliferation Treaty* (NPT). Amerika Serikat menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mendirikan sebuah rezim yang disebut *Proliferation security initiative* (PSI). Meskipun Amerika Serikat menyatakan ketidak setujuannya terhadap program pengembangan senjata nuklir Korea Utara, namun Korea Utara tetap melakukan pengembangan senjata nuklir. Tercatat Korea Utara telah melakukan enam kali uji coba senjata nuklir. Dimulai dari percobaan nuklir pada Oktober 2006, Juni 2009, Februari 2013, Januari 2016, September 2016, dan

September 2017. Korea Utara yang secara sepihak menarik diri dari NPT, mendorong Amerika Serikat untuk melakukan upaya pelucutan senjata nuklir terhadap Korea Utara.

Konsep *security dilemma* digunakan untuk menganalisa bagaimana situasi dilema yang dimiliki oleh Amerika Serikat maupun Korea Utara dalam mengambil kebijakannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara? Apakah kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Korea Utara dalam isu Nuklir?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam hasil penelitian ini diperoleh data mengenai kepentingan nasional Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara, Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan respon Korea Utara. Sesuai dengan kampanye Donald Trump America First didapat bagaimana kepentingan nasional Amerika Serikat dan kebijakan yang diambil pada masa kepemimpinan Donald Trump.

Kata Kunci: Korea Utara, Amerika Serikat, Nuklir

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan segala bentuk hubungan antar negara. Dalam hubungan internasional, negara memainkan peran penting karena memiliki akses terhadap arena internasional. Dalam pelaksanaan hubungan antar negara di arena internasional yang dijalin oleh dua negara atau lebih bisa menjadi kerjasama atau konflik. Negara dalam hal hubungan internasional ketika dipersenjatai dalam beberapa tingkatan dapat dianggap sebagai upaya untuk pertahanan negara ataupun dianggap untuk menyerang sehingga menyebabkan paradoks disebut *security dilemma* (Jackson dan Sorensen, 2013: 7).

Keamanan nasional menjadi suatu hal yang sangat penting untuk diperjuangkan untuk keberlangsungan kedaulatan negara. Negara dituntut untuk harus mampu melindungi dirinya sendiri dari ancaman aktor lain (Yani, Montratama dan Wahyudin, 2017: 5). Dalam isu keamanan nasional, satu ancaman yang nyata adalah senjata pemusnah massal / *Weapons of Mass Destruction* (WMD). Dalam perkembangannya terdapat tiga kategori umum untuk senjata pemusnah massal, yaitu, senjata nuklir, senjata kimia, dan senjata biologi. Senjata pemusnah massal dibedakan dari senjata konvensional karena potensi mematikan yang sangat besar. Ketika senjata nuklir ditembakkan dengan rudal balistik / ballistic missile, senjata tersebut bisa ditembakkan dari

teritori negara pengirim dan membuat kerusakan yang besar di teritori negara lain. Alasan tersebut menjadikan nuklir yang berada di Asia Timur milik Korea Utara bisa dianggap ancaman oleh Amerika Serikat (AS) (Goldstein dan Pevehouse, 2012: 149).

Korea Utara memiliki program senjata nuklir dan rudal yang aktif dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Berdasarkan data dari *Arms Control Association*, hingga bulan Juni 2018, Korea Utara diperkirakan memiliki 20 hulu ledak nuklir dan memiliki bahan yang cukup untuk mengembangkan sekitar 30-60 senjata nuklir. Korea Utara sendiri telah menarik diri dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir / *Non Proliferation Treaty* (NPT) nuklir pada tahun 2003 (<https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile> diakses pada 1 Maret 2019).

Amerika Serikat tidak setuju dengan pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat menyampaikan ketidaksetujuannya dengan berbagai cara. Presiden George Bush menyampaikan bahwa Korea Utara adalah "axis of evil". pada pidatonya tahun 2002 Presiden Bush. Tidak lama setelah cap Axis of Evil diberikan pada Korea Utara, pada bulan Desember tahun 2002, Korea Utara mengumumkan akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir di Yongbyon dan mengusir pengawas dari Badan energi Atorn

Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dari Korea Utara (<https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-leave-north-korea> diakses pada 7 Maret 2019).

Pada Januari 2003 Korea Utara menarik diri dari NPT. Amerika Serikat menunjukkan ketidaksetujuannya dengan mendirikan sebuah rezim yang disebut *Proliferation security initiative* (PSI). Meskipun Amerika Serikat menyatakan ketidaksetujuannya, namun Korea Utara tetap melakukan pengembangan persenjataan nuklirnya. Pada bulan Oktober 2006 untuk pertama kalinya Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir. Amerika Serikat merespon dengan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan sanksi terhadap Korea Utara (<https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html> diakses pada 1 Maret 2019).

Pada Mei tahun 2009 Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklir keduanya. Presiden Barack Obama menyebut uji coba senjata nuklir tersebut sebagai ancaman bagi Amerika Serikat dan perdamaian dunia. Pada tahun 2013, Kim Jong Un, melakukan uji coba nuklir pertamanya sebagai pemimpin Korea Utara dan merupakan ujicoba nuklir Korea Utara yang ke tiga. Amerika Serikat merespon dengan memindahkan beberapa peralatan pertahanan rudal ke Korea Selatan (https://www.washingtonpost.com/news/world-views/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm_term=.f3a31c481f14 diakses pada 11 Maret).

Pada 6 Januari 2016, Korea Utara melakukan uji coba nuklir keempatnya. Presiden Obama merespon dengan menjatuhkan sanksi *Executive Order* 13722. Pada dokumen tersebut dituliskan bahwa semua properti dan kepentingan yang ada di Amerika Serikat yang memiliki hubungan dengan Pemerintah Korea Utara diblokir (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx> diakses pada 3 Maret 2019).

Pada tahun 2017 Amerika Serikat memiliki pemimpin baru, Presiden Donald Trump. Pada *National Security Strategi* (NSS) yang baru, Trump menyatakan bahwa nuklir Korea Utara menimbulkan ancaman global dan untuk itu membutuhkan respons global. Trump juga menyampaikan komitmennya bekerja sama dengan Korea Selatan melalui militer (<https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2017/12/NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf> diakses pada 3 Maret 2019).

Dalam perjalanannya Trump sudah menjatuhkan sanksi yang termuat dalam *Executive Order* 13810. Dalam dokumen pemberian sanksi tersebut dijelaskan bahwa penyebab pemberian sanksi adalah uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara pada 2 September 2017 dan peluncuran rudal antar benua / *intercontinental ballistic missile launches* (<https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx> diakses pada 3 Maret 2019).

Pada awal 2018, Korea Utara telah menunjukkan minat dalam melakukan negosiasi mengenai pelucutan senjata. Hal tersebut dibuktikan dengan pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. *Trump – Kim Summit*. Pertemuan tersebut adalah pertama kalinya seorang pemimpin AS dan Korea Utara bertemu.

Dari rangkaian pelucutan senjata diatas kita bisa melihat pola hubungan aksi reaksi antar dua negara. Apa yang bisa diambil dari pola ini adalah bagaimana kedua negara tersebut bertindak rasional dengan berlandaskan pada pandangan *Security Dilemma*. *Security Dilemma* adalah keadaan dimana suatu negara memutuskan untuk meningkatkan keamanan negaranya (Korea Utara dengan nuklirnya), namun disaat bersamaan akan menurunkan keamanan negara lain (anggapan ancaman keamanan negara oleh Amerika Serikat).

Tema hubungan antar negara Amerika Serikat dan Korea Utara sebelumnya sudah diteliti oleh Zaki Haryadi Putra dalam penelitian yang berjudul “Kebijakan Luar

Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara” Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak dari tahun fokus penelitian dan teori yang dipakai untuk menganalisa fenomena tersebut (<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-s1-2007-zakiharyad-6732&q=korea%20utara> diakses pada 12 Maret 2019).

Hubungan antara Amerika Serikat dan Korea Utara juga sudah pernah diteliti oleh Lamsinar Septian Siboro berjudul “Cyber Warfare Antara Amerika Serikat Dan Korea Utara Dalam Kasus Film The Interview Oleh Sony Pictures Entertainment”. Adapun perbedaannya terletak pada penelitian tersebut dimaksudkan untuk mendeskripsikan cyber warfare antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam kasus film The Interview oleh Sony Pictures Entertainment (<https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-lamsinarse-39360&q=korea%20utara> diakses pada 12 Maret 2019).

Setelah melakukan pencarian mendasar mengenai materi Pelucutan senjata nuklir, Korea Utara, dan Amerika Serikat, peneliti merasa ada keterkaitan diantara ketiganya dan dengan demikian peneliti memilih judul “Upaya Pelucutan Senjata Nuklir Korea Utara Oleh Amerika Serikat 2016 - 2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?
2. Bagaimanan kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?
3. Bagaimana respon Korea Utara terhadap pilihan kebijakan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara?

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penelitian

Secara garis besar maksud dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pelucutan senjata

Nuklir Korea Utara oleh Amerika Serikat 2016 – 2019.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian karya ilmiah ini antara lain untuk:

1. Mengetahui kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
2. Menganalisa kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.
3. Menganalisa respon Korea Utara terhadap kebijakan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan karya ilmiah ini adalah untuk menjadi bahan tambahan informasi bagi peneliti maupun pembaca mengenai pelucutan senjata nuklir, Korea Utara, Amerika Serikat dan *Security Dilemma*. Karya ilmiah ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dalam kajian Studi Keamanan Internasional, Diplomasi dan Negosiasi, Dinamika Politik Internasional, dan Analisa Politik Luar Negeri. Karya ilmiah ini juga diharapkan bisa menambah wawasan mengenai hubungan internasional yang terjadi dan dampaknya bagi suatu negara.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan Penelitian ini ialah diharapkan dapat menambah wawasan tentang Hubungan Internasional dan dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, peneliti, dan masyarakat pada umumnya. Karya tulis ilmiah ini diharapkan bisa menambah pengetahuan mengenai senjata nuklir dalam perspektif hubungan internasional serta bagaimana negara mengarahkan usaha dan upyanya untuk mempengaruhi terhadap kebijakan negara lain.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Politik Luar Negeri

Politik luar negeri didasarkan pada upayanya untuk memenuhi kepentingan nasional. Politik luar negeri berisikan strategi dan taktik yang digunakan dalam hubungannya

dengan negara lain. Politik luar negeri adalah bagian dari Hubungan Internasional yang dapat menjadi panduan bagi negara-negara lain yang ingin bersahabat atau bermusuhan dengan negara tersebut. Dalam pelaksanaannya politik luar negeri bisa berupa sikap, arah, atau strategi untuk memenuhi atau mencapai kepentingan nasional (Hudson, 2008: 56).

Politik luar negeri cenderung dimaknai sebagai sebuah identitas yang menjadi karakteristik pembeda suatu negara dengan Negara lain. Politik luar negeri adalah paradigma besar yang dianut sebuah negara tentang cara pandang Negara tersebut terhadap dunia. Politik luar negeri adalah wawasan internasional, oleh karena itu polugri cenderung bersifat tetap (Priangani, 2014: 3).

2.1.1.1 Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri merupakan suatu perangkat formula dari cita – cita, nilai, sikap, arah, strategi, metode, panduan, tindakan serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. Kebijakan luar negeri merupakan dasar untuk mencapai suatu tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu intrenasional atau lingkungan sekitarnya (Jackson dan Sorensen, 2013: 439).

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau implementasi dari politik luar negeri yang diterapkan dengan berbagai cara tergantung pada pendekatan, gaya, dan keinginan pemerintahan terpilih. Dalam mengambil kebijakan yang terdiri dari pilihan – pilihan, pengambil kebijakan harus mempertimbangkan berbagai faktor baik secara ekonomi, politik, dan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan luar negeri, dengan demikian akan bergantung pada landasan besar berupa politik luar negeri.

2.1.2 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional adalah tujuan dan faktor penentu yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Kepentingan nasional terdiri dari kebutuhan negara seperti pertahanan, keamanan, militer

dan kesejahteraan ekonomi. Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara (Perwita & Yani, 2005: 35).

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan hal yang dicita-citakan, dalam hal ini kepentingan nasional yang relatif tetap sama diantara semua negara atau bangsa adalah keamanan yang mencakup kelangsungan hidup rakyatnya dan kebutuhan wilayahnya (Rudy, 2002: 116).

2.1.3 Denuclearization Dalam Hubungan Internasional

Saat ini, kata denuklirisasi khusus ditujukan dalam isu nuklir di Semenanjung Korea. Istilah ini bukan digunakan para ahli untuk membicarakan tentang penghapusan program senjata nuklir seperti yang terjadi di Afrika Selatan, Irak atau Libya. Dalam konteks ini, kata itu hampir selalu dimaknai dengan "pelucutan senjata".

Istilah ini sendiri muncul akhir tahun 1990-an, dimana ketika itu, ambisi nuklir Korea Utara dimulai. Pada akhir Perang Dingin, satu-satunya senjata nuklir di Semenanjung Korea adalah milik Amerika Serikat, tepatnya dikawasan Korea Selatan. Ketika itu, Korea Utara pun memiliki ambisi untuk membuat program nuklirnya sendiri, Pada tahun 1992, Korea Selatan dan Korea Utara menandatangani sebuah deklarasi bersama "denuklirisasi Semenanjung Korea."

Kata "denuklirisasi" bertahan karena adanya Deklarasi Bersama dimana disitu tertulis komitmen Korea Utara untuk meninggalkan senjata nuklirnya setelah Pyongyang menarik diri dari NPT pada tahun 2003

(<https://www.nytimes.com/2018/04/04/opinion/avoid-nuclear-war-denuclearization.html> diakses 8 Mei 2019).

2.1.4 Security Dilemma

Security Dilemma adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri

menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara. Beberapa peneliti hubungan internasional menemukan bahwa *Security Dilemma* adalah sumber konflik paling penting dalam hubungan internasional. Mereka berpendapat bahwa di dunia internasional tidak ada monopoli kekerasan yang sah dan sebagai konsekuensinya setiap negara harus menjaga keamanan dan kelangsungan hidupnya sendiri. Karena alasan ini tujuan utama negara adalah memaksimalkan keamanan mereka sendiri (Synder, 2002; 155).

Mengurangi keamanan negara lain tidak secara otomatis menempatkan negara dalam dilema, tetapi karena struktur anarkis, negara-negara lain akan mengikuti, jika satu negara mempersenjatai. Mereka tidak dapat mengetahui apakah negara yang mempersenjatai akan menggunakan kemampuan militernya yang meningkat untuk serangan di masa depan. Karena alasan ini mereka akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuasaan, atau mereka akan melancarkan serangan pendahuluan untuk mencegah negara mempersenjatai dari mengganggu keseimbangan. Jika mereka memilih opsi pertama, hasilnya mungkin spiral keamanan. Spiral keamanan adalah proses aksi-reaksi, di mana dua negara bagian terikat dalam perlombaan persenjataan dengan masing-masing negara menanggapi peningkatan dalam pengadaan senjata dan pengeluaran pertahanan oleh negara lain yang menyebabkan mereka berdua mempersenjatai lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ini dapat menyebabkan perang dalam jangka panjang. Jika mereka memilih opsi terakhir, konflik militer akan segera terjadi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hubungan internasional saat ini kebijakan suatu negara dan respon negara lainnya menjadi kajian yang menarik. Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang berseteru telah berkembang dalam

beberapa tahun terakhir dipertegas oleh enam uji coba nuklir Korea Utara. Korea Utara, menjadi isu internasional ketika berusaha mengembangkan nuklirnya pada tahun 2002 dan dikhawatirkan memproduksi senjata pemusnah massal untuk diberikan terhadap pihak lain. Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat berniat untuk melucuti senjata nuklir Korea Utara dikarenakan akan mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.

Secara konseptual, keamanan menjadi penting untuk diperhatikan, baik keamanan negara dari dalam maupun dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Munculnya teknologi senjata nuklir dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan internasional dengan melihat dampak yang ditimbulkan. Pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara dapat mengancam keamanan negara-negara tetangganya bahkan Amerika Serikat.

Pada tahun 2013, Kim Jong Un, pemimpin Korea Utara yang baru berkuasa, melakukan uji coba nuklir pertamanya sebagai pemimpin. Sebagai tanggapan, Amerika Serikat memindahkan beberapa peralatan pertahanan rudal dan pembom siluman berkemampuan nuklir ke Korea Selatan.

Pada bulan Januari tahun 2017, Amerika Serikat memiliki presiden baru, Donald Trump. Dalam penelitian ini akan dikaji bagaimana pilihan yang dimiliki oleh Amerika Serikat dalam upaya pelucutan senjata nuklir Korea Utara. Dalam keadaan yang dimana kebijakan yang diambil oleh kedua belah pihak akan berdampak pada pihak lainnya, penulis menggunakan teori *Security Dilemma*. Teori *Security dilemma* digunakan untuk menelaah bagaimana aksi – reaksi antara Amerika Serikat dan Korea Utara.

3. Metode Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah desain penelitian kualitatif menggunakan metode pendekatan deskriptif. Tujuan penggunaan desain penelitian kualitatif adalah untuk menemukan pola yang bersifat interaktif, menggambarkan realitas

yang kompleks dan memperoleh pemahaman makna (Ikbar, 2014: 18).

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang dipilih secara sistematis serta melakukan studi dokumen, studi kepustakaan dengan sumber – sumber dari buku – buku, jurnal, internet dan sumber kepustakaan lainnya yang berhubungan dengan kebijakan Amerika Serikat, upaya pelucutan nuklir Korea Utara maupun teori *Security Dilemma*. Dengan demikian didapatkan sumber primer berupa hasil wawancara dan sumber sekunder dari hasil studi dokumen. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2019. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu enam bulan dimulai dari bulan Maret 2019 hingga bulan Juli 2019.

4. Pembahasan dan Hasil Penelitian

4.1 Gambaran Objek Penelitian

4.1.1 Amerika Serikat

4.1.1.1 Politik Luar Negeri Amerika Serikat

Secara umum politik luar negeri Amerika Serikat akan mengikuti kepentingan nasionalnya seperti memantapkan diri sebagai polisi dunia, melakukan dominasi terhadap sumber daya alam di berbagai negara, mendapatkan keuntungan ekonomi, penyebaran ideologi liberalisme dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terorisme, serta mewujudkan sebuah tatanan dunia baru. Adapun kepentingan secara spesifik untuk menjaga kelangsungan hidup warga Amerika Serikat yaitu:

- a) Mencegah ancaman senjata pemusnah massal terhadap Amerika Serikat
- b) Menjamin keamanan nasional negara sekutu Amerika Serikat
- c) Mencegah munculnya kekuatan-kekuatan besar yang berpotensi bermusuhan dengan negara Amerika Serikat dan mencegah munculnya negara gagal di dekat wilayah Amerika Serikat.
- d) Menjamin kelangsungan hidup dan stabilitas sistem global dalam perdagangan,

pasar keuangan, pasokan energi dan lingkungan (Allison, 2010: 3-6).

Politik Luar Negeri Amerika Serikat hingga saat ini, mempunyai suatu pola yang dinamis, dimana pada tiap-tiap periode pemerintahan Presiden mempunyai prioritas sendiri dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Hal ini dikarenakan penyesuaian kepentingan nasional dengan konteks internasional yang dihadapi

4.1.1.2 Pandangan Amerika Serikat terhadap Isu Nuklir

Amerika Serikat menjadi negara senjata nuklir pertama di dunia pada tahun 1945, dan satu-satunya negara yang pernah menggunakan senjata nuklir di masa perang. Hingga saat ini, Amerika Serikat memiliki kekuatan senjata nuklir sekitar 4.480 hulu ledak di berbagai tempat. Karena peran sentralnya dalam pengembangan senjata nuklir, Amerika Serikat memiliki "tanggung jawab moral" untuk memimpin upaya global mencari "perdamaian dan keamanan dunia tanpa senjata nuklir". Upaya amerika untuk proliferasi nuklir bisa dilihat dari bagaimana Amerika Serikat menjadi kekuatan pendorong di belakang NPT dan rezim nonproliferasi lainnya.

Secara umum pandangan Amerika Serikat mengenai isu nuklir bisa dilihat pada National Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction Terrorism. Adapun secara spesifik amerika serikat melakukan hal hal berikut dalam mendhadapi isu nuklir

- a) Menghentikan akses terhadap bahan dan peralatan pemusnah massal
- b) Mendeteksi rencana pengembangan senjata pemusnah massal
- c) Bersama – sama dengan negara mitra mendorong proliferasi nuklir
- d) Memperkuat Pertahanan Nasional Amerika Serikat melawan senjata pemusnah massal (National Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction Terrorism, 2018: 12)

Selain melalui National Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction Terrorism, Amerika Serikat mendorong NPT. Melalui NPT, Amerika Serikat melihat bagaimana pandangannya secara umum

terhadap isu nuklir yaitu bahwa hanya boleh ada lima negara yang memiliki senjata nuklir. Kelima negara tersebut adalah Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan Cina. Amerika Serikat mengharapkan agar tidak ada lagi negara diluar kelima negara tersebut untuk mengembangkan senjata nuklir dan untuk mencegahnya Amerika Serikat mendorong agar negara nuklir tidak membocorkan informasi mengenai senjata nuklir.

4.1.2 Korea Utara

4.1.2.1 Program Nuklir Korea Utara

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari NPT pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia, khususnya Amerika Serikat. Jauh sebelum krisis nuklir dimulai, pengembangan teknologi nuklir Korea Utara berawal sejak berakhirnya Perang Korea pada tahun 1950 hingga 1953. Keberpihakan Korea Utara dengan Blok Timur, membuat Korea Utara merasa terancam dari serangan nuklir yang mungkin dilancarkan oleh Amerika Serikat. Ancaman tersebut memaksa Pyongyang untuk mengembangkan teknologi nuklir untuk alasan pertahanan diri (Pinkston, 2008: 5).

Program nuklir Korea Utara dibangun atas bantuan Uni Soviet. Dibawah kerangka perjanjian Uni Soviet-Korea Utara tahun 1959. Terdapat lima motif dasar pengembangan nuklir Korea Utara, yaitu:

- a) melawan ancaman nuklir AS.
- b) Untuk mendapatkan jaminan keamanan
- c) memperoleh pengaruh diplomatik dari negara lain (Mazaar, 1995: 19).

Sementara Kim Jong Un menjelaskan bahwa motif pengembangan nuklir Korea Utara dilandasi oleh beberapa poin yaitu:

- a) Terinspirasi oleh gagasan Juche dan Songun dimana militer memiliki prioritas khusus.
- b) Adanya ancaman serangan militer konvensional dan senjata pemusnah massal dari negara lain.
- c) Mempertahankan warisan penting para leluhur berupa partai dan rakyat yang tidak terkalahkan

Dari perspektif Korea Utara, memiliki senjata nuklir adalah hal yang masuk akal karena senjata tersebut bisa menjadi alat untuk memenuhi kepentingan nasionalnya, yaitu:

- a) Keselamatan rejim
- b) Nuklir sebagai kebanggaan nasional.
- c) Legitimasi pemerintahan domestik dan martabat dalam Kancah Politik Internasional.
- d) Menanggulangi perbedaan yang besar dengan kekuatan militer konvensional.
- e) Merusak aliansi Korea Selatan-AS

(<https://www.heritage.org/insider/summer-2018-insider/why-does-north-korea-want-nukes> diakses pada 24 Juni 2019).

4.1.3 Dinamika Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara

Hubungan Korea Utara - Amerika Serikat yang tidak baik dimulai sejak Perang Korea dan beberapa tahun terakhir dipertegas dengan enam uji coba senjata nuklir Korea Utara. Amerika Serikat dan Korea sudah memiliki hubungan kerjasama sejak abad ke 19. Pada tahun 1882 Amerika Serikat dan Korea memiliki perjanjian perdagangan dan satu tahun setelahnya utusan diplomatik Amerika Serikat berada di Korea. Hubungan AS-Korea berlanjut hingga 1905, ketika Jepang mengambil alih kepemimpinan atas Korea. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Semenanjung Korea dibagi menjadi dua zona pendudukan, dengan Amerika Serikat di Selatan dan Uni Soviet di Utara. Harapan awal untuk Korea yang bersatu dan merdeka tidak terwujud, dan pada tahun 1948 dua negara terpisah didirikan yaitu Korea Selatan dan Korea Utara.

Pada 25 Juni 1950, pasukan Korea Utara menyerbu Korea Selatan. Dipimpin oleh Amerika Serikat, koalisi PBB dari 16 negara menjadi sekutu dari Korea Selatan. Korea Utara sendiri dibantu oleh Cina. Perang Korea terus berlanjut hingga gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Amerika Serikat mendukung penyatuan kembali secara damai Korea dengan persyaratan yang dapat diterima oleh rakyat Korea

Dari segi ekonomi, Amerika Serikat memberlakukan embargo ekonomi total Korea

Utara pada 1950 ketika Korea Utara menyerang Korea Selatan. Selama tahun-tahun berikutnya, memang beberapa sanksi AS berkurang, namun beberapa sanksi yang lain diterapkan. Baru-baru ini, *Executive Order* 13810 ditandatangani oleh Presiden Trump pada tanggal 21 September 2017, setelah uji coba nuklir Korea Utara bulan September 2017.

Secara diplomatik Amerika Serikat dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik. Untuk layanan konsuler terbatas kepada warga Amerika Serikat, biasanya melalui perwakilan Khusus Amerika Serikat untuk Korea Utara Stephen Biegun ataupun melalui Kedutaan Besar Swedia di Korea Utara. Korea Utara sendiri tidak memiliki kedutaan di Washington, DC, tetapi memiliki perwakilan di Amerika Serikat melalui perwakilannya di Perserikatan Bangsa Bangsa di New York (<https://www.state.gov/u-s-relations-with-north-korea/> diakses pada 2 Juli 2019).

4.2 Pembahasan

4.2.1 Kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea Utara

Pada tahun 2016 Donald Trump mengumumkan untuk menjadi kandidat presiden Amerika Serikat dari partai Republik. Dalam pengumumannya sebagai salah satu kandidat, Donald Trump sempat menyinggung beberapa isu hubungan internasional Amerika Serikat. Saat itu Donald Trump mengatakan bahwa Amerika Serikat berada dalam masalah yang serius karena saat ini Amerika Serikat tidak menjadi negara pemenang lagi dalam konteks hubungan internasional. Donald Trump merujuk pada persaingan ekonomi dengan Cina dan Jepang dan semakin tingginya pengembangan senjata nuklir. Oleh sebab itu, Donald Trump mengkampanyekan *America First* sebagai bentuk upaya menjadikan Amerika Serikat sebagai pemenang dalam hubungan internasional dalam artian mendapatkan perjanjian-perjanjian yang menguntungkan bagi Amerika Serikat.

America First adalah strategi nasional Amerika yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan kepentingan nasional AS. *America First* adalah strategi realisme yang lebih

mengutamakan hasil. *America First* didasarkan pada pandangan bahwa perdamaian dan kemakmuran bergantung pada negara-negara yang kuat dan berdaulat yang menghormati warganya di dalam negeri dan bekerja sama untuk memajukan perdamaian di luar negeri. (National Security Strategy: 2)

Oleh sebab di atas kita bisa melihat bagaimana perubahan kepentingan Amerika Serikat dibawah Presiden Trump terhadap Korea Utara. Peneliti menyajikan kepentingan nasional Amerika Serikat terhadap negara Korea Utara dalam lima poin utama, yaitu:

a) Amerika Serikat Mencegah Korea Utara untuk Menggunakan Senjata Nuklir. Hal yang paling penting bagi Amerika Serikat tentu saja adalah keamanan negara dan warga negara didalamnya. Oleh sebab itu Amerika Serikat harus memastikan apapun yang terjadi di Korea Utara, senjata nuklir tidak pernah digunakan. Dalam hal ini Amerika Serikat harus mampu mengetahui secara pasti kekuatan senjata nuklir dan rudal milik Korea Utara. Amerika Serikat terus mendorong agar Korea Utara bersedia menerima perwakilan Badan Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA) untuk memverifikasi data senjata nuklir Korea Utara.

b) Menghentikan Program Senjata Nuklir dan Rudal Korea Utara. Amerika Serikat adalah negara pendorong berdirinya Penjanjian Non Proliferasi Nuklir / Non Proliferation Treaty (NPT). Sebagai negara yang mendorong berdirinya NPT, Amerika Serikat tidak setuju dengan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Bagi Amerika Serikat negara yang bisa memiliki senjata nuklir adalah negara yang berdasarkan NPT diperbolehkan, yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis.

c) Menjaga Keamanan Nasional Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat senjata nuklir Korea Utara adalah ancaman nyata bagi kemananan nasional. Setelah hubungan permusushan yang dimulai sejak Perang Korea pada tahun 1950, Korea Utara sejak era Kim Il Sung hingga Kim Jong Un selalu mengancam untuk menggunakan senjata nuklir. Hal tersebut

tentu saja menjadi ancaman bagi negara Amerika Serikat yang berdiri diatas prinsip keamanan dan kebebasan.

d) Menjaga Keamanan Sekutu Amerika Serikat di Asia Timur. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki sekutu yang berdekatan dengan Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Aliansi AS-Jepang telah lama menjadi jangkar keamanan AS di Asia. Negara sekutu lainnya yang penting adalah Korea Selatan. Korea Selatan adalah salah satu mitra strategis dan ekonomi terpenting Amerika Serikat di Asia.

e) Hegemoni Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Dalam hal keamanan, Korea Utara menjadi negara yang sangat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur. Korea Utara, dengan uji coba senjata nuklir dan rudal, menjadikan wilayah Asia Timur kompleks secara bidang politik dan keamanan.

4.2.2 Kebijakan yang diambil oleh Amerika Serikat dan Pelucutan Senjata Nuklir Korea Utara

Presiden Trump menyusun sebuah kebijakan untuk isu nuklir Korea Utara *Maximum Pressure and Engagement*. Sebuah strategi yang bertumpu dari tekanan – tekanan terhadap Korea Utara. Tekanan yang dilakukan bisa dimulai dari kata – kata ancaman, sanksi, latihan militer dan lainnya. Sedangkan *Engagement* adalah proses selanjutnya dari strategi tersebut. *Engagement* bisa dimulai dengan menarik Korea Utara terhadap meja perundingan yang tidak bisa ditolak karena tekanan yang sudah dilakukan diawalnya.

Adapun kebijakan Presiden Trump, menekankan bahwa tidak akan ada *Engagement* dengan Korea Utara jika Korea Utara sendiri belum merasakan tekanan yang kuat dari berbagai pihak. Inti dari *Engagement* sendiri adalah denuklirisasi Korea Utara. Hal tersebut berarti pelucutan senjata secara menyeluruh dengan posisi Amerika Serikat tetap tidak menerima Korea Utara sebagai negara nuklir. Adapun terjadinya pertemuan haruslah juga mendapatkan perhatian dari berbagai pihak seperti Organisasi internasional dan negara sekutu Korea Utara, Cina.

4.2.2.1 Pressure

Dalam melihat tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat kita harus melihat serangkaian ancaman yang dilancarkan oleh Presiden Donald Trump melalui pidato hingga Tweet Presiden Trump. Pada Agustus 2017 Presiden Trump mengancam dengan akan memberikan *Fire and fury*. Lebih lanjut dalam pertemuan Sidang Umum Perserikatan Bangsa – Bangsa bulan September 2017, Presiden Trump mengancam menggunakan kata *Totally Destroy North Korea*. Serangkaian ancaman yang dikeluarkan oleh Presiden Trump menjadikan Korea Utara sadar akan posisi Presiden Trump dalam isu senjata nuklir.

Bentuk lain dari tekanan yang dilakukan oleh Amerika Serikat adalah penjatuhan sanksi terhadap Korea Utara. Pada 21 September 2017, Presiden Donald Trump mengeluarkan *Executive Order 13810* yang merupakan sanksi ekonomi terhadap Korea Utara. Selanjutnya Amerika Serikat juga melarang masuknya warga negara Korea Utara ke Amerika Serikat. Pemerintahan Trump juga menunjuk Korea Utara sebagai negara sponsor terorisme,

Selain sanksi dari Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat mendorong sanksi dari organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa Bangsa dan Uni Eropa. Amerika Serikat juga mendorong Cina untuk memberlakukan sanksi. Pada bulan Februari 2017, Cina mengumumkan akan melarang semua impor batubara selama tahun 2017. Cina juga telah melarang ekspor beberapa produk minyak bumi dan produk tekstil dari Korea Utara sesuai dengan sanksi PBB. Selain tekanan ekonomi, Amerika Serikat juga melakukan tekanan secara militeristik. Pada tahun 2017 saja, Amerika Serikat telah terlibat dalam lebih dari enam latihan militer bersama dengan sekutunya di Asia

(<https://www.apnews.com/86626d21ea2b45c79457a873a747c452> diakses pada 12 Juli 2019).

Kebijakan *Maximum Pressure* telah bisa membawa Kim Jong Un ke dalam meja perundingan. Perundingan sendiri bisa dimasukkan dalam kategori *Engagement*, proses

selanjutnya dari strategi nuklir Amerika Serikat terhadap Korea Utara (<https://foreignpolicy.com/2018/02/15/maximum-pressure-needs-more-time-trump-pence-united-states-north-korea/> diakses pada 13 Juli 2019)

4.2.2.2 *Engagement*

Seperti diketahui bahwa proses selanjutnya dari *Maximum Pressure* adalah *Engagement*. *Engagement* disini berarti melakukan pendekatan dengan cara diplomasi, seperti pertemuan antar kepala negara. Namun sejarah mencatat bahwa pemimpin Korea Utara tidak pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan Presiden Amerika Serikat. Oleh sebab itu perlu dipastikan bahwa konsep *maximum pressure* harus berhasil terlebih dahulu sehingga *Engagement* antara kedua negara ini terjadi.

Pertemuan pertama antara presiden AS dan pemimpin Korea Utara berlangsung pada 12 Juni 2018 di Singapura. Presiden Trump dan Kim Jong Un. Dalam pertemuan tersebut pemimpin kedua negara berkomitmen untuk memberikan jaminan keamanan kepada Korea Utara dan komitmen untuk denuklirisasi. Trump juga menanggihkan latihan militer bersama dengan Korea Selatan.

Presiden Trump dan Kim Jong Un mengadakan pertemuan kedua pada 27 Februari 2019. Pertemuan tersebut dilaksanakan di Vietnam. Pada tanggal 29 Februari pertemuan selesai dengan tanpa kesepakatan. Presiden Amerika mengatakan Korea Utara ingin semua sanksi terhadap Korea Utara dicabut, yang tentu tidak bisa dilakukan Amerika Serikat tanpa adanya denuklirisasi dari Korea Utara.

Serangkaian proses *Engagement* diatas adalah bagian dari kebijakan luar negeri Presiden Trump. Meskipun target dari *Maximum Pressure* (membawa Korea Utara dalam meja perundingan) telah berhasil, namun tak bisa dipungkiri bahwa hasil akhir berupa denuklirisasi belum bisa tercapai (<https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/> diakses pada 13 Juli 2019).

4.2.3 Respon Korea Utara Terhadap Kebijakan Amerika Serikat dalam Pelucutan Senjata nuklir Korea Utara

Pada pidato tahunannya pada Januari 2017 Kim Jong Un menyatakan bahwa Korea Utara akan terus membangun kemampuan pertahanan diri, termasuk nuklir. Pidato tersebut terbukti pada Juli 2017 ketika Korea Utara untuk pertama kalinya berhasil menguji coba rudal balistik antarbenua / *Inter Continental Ballistic Missile* (ICBM), dan mengumumkan bahwa rudal tersebut mampu mengenai Alaska.

Pada Agustus 2017 terjadi perang kata yang dimulai ketika Presiden Donald Trump melakukan ancaman terhadap Kim Jong Un. Ancaman tersebut mulai dari akan melepaskan *fire and fury* terhadap Korea Utara, *totally destroy* Korea Utara hingga menyebut Kim Jong Un sebagai *Little Rocket Man*. Pemimpin Korea Utara membalas dengan melabeli presiden AS *mentally deranged*. Bisa dilihat pada posisi ini Korea Utara mampu untuk menanggapi Amerika Serikat secara setimpal bahkan pada 3 September 2017, Korea Utara melakukan uji coba nuklir keenamnya.

Pada pidato kenegaraannya tahun 2018 Korea Utara tetap berpegang pada pengembangan senjata nuklir. Namun ketika bulan April 2018, Cina beserta Uni Eropa, dan Dewan Keamanan PBB mulai menarik bantuan dan mengurangi kerjasama dengan Korea Utara kita bisa melihat perubahan dalam sikap Korea Utara. Pada bulan Mei 2018 Korea Utara meledakkan fasilitas nuklir pyonggyeri yang merupakan lokasi uji coba senjata nuklir. Hal tersebut merupakan langkah serius menuju denuklirisasi Dengan menutup lokasi uji coba nuklir, Pyongyang mengambil langkah jauh melampaui moratorium pengujian nuklir (https://www.washingtonpost.com/news/worldpost/wp/2018/05/30/north-korea-test-site/?noredirect=on&utm_term=.b43d7add6ab1 diakses pada 14 Juli 2019).

Pada Juni 2018 Donald Trump dan Kim Jong Un bertemu di Singapura dan menandatangani dokumen di mana pemimpin Korea Utara berkomitmen untuk denuklirisasi.

Pertemuan ini dilaksanakan di Singapura. Kim Jong Un saat itu menandatangani pernyataan bersama yang berisikan jaminan keamanan untuk Korea Utara dan denuklirisasi Semenanjung Korea (<https://www.dw.com/en/from-little-rocket-man-to-denuclearization-a-timeline-of-us-north-korea-relations-under-kim-jong-un/a-43729095> diakses pada 14 Juli 2019).

Selanjutnya juga Kim Jong Un bersedia melakukan pertemuan lanjutan di Vietnam. Pertemuan antara Kim Jong-un dan Donald Trump dilaksanakan di Vietnam pada 27–28 Februari 2019. Dalam pertemuan di Vietnam Korea Utara ingin dicabut dari semua sanksi. Namun berdasarkan penjelasan dari Menteri Luar Negeri Korea Utara Ri Yong-ho menegaskan bahwa Amerika Serikat hanya berusaha mencabut sebagian dari lima sanksi PBB yang diberikan kepada Korea Utara antara tahun 2016 dan 2017 sehingga tidak tercapai kesepakatan.

Dari serangkaian respon Korea Utara diatas bisa diperhatikan bagaimana sikap sebelum dan setelah uji coba senjata nuklir ke enam. Sebelum Uji coba senjata nuklir Korea Utara berani membalas segala retorika yang dilayang oleh Presiden Trum. Namun setelah uji coba senjata nuklir yang ke enam terdapat banyaknya sanksi yang dibebankan terhadap Korea Utara. Dari serangkaian sanksi yang bisa dianggap paling memberatkan adalah mitra terdekatnya yaitu Cina. Terlihat setelah hal tersebut Korea Utara mulai berusaha untuk menunjukkan niat dalam pelucutan senjata nuklir. Dimulai dari meledakan fasilitas nuklir di Younggyeri hingga akhirnya bersedia melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat.

Proses Engagement Presiden Trump dengan Kim tampaknya tidak berhasil. Tujuan utama dari kebijakan trump tentu saja denuklirisasi. Namun sepertinya setelah pertemuan kedua presiden Trum dan Kim Jong un di Vietnam hal tersebut tidak terjadi. Adapun penulis mengasumsikan adanya keadaan Security Dilemma yang dihadapi Korea Utara mengenai Denuklirisasi.

Kepentingan Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir adalah untuk pertahanan dari hostile policy Amerika Serikat. Berdasarkan kepentingan tersebut bisa diambil catatan bahwa senjata nuklir adalah aksi defensif Korea Utara. Hal tersebut bisa didukung dengan kenyataan bahwa AS telah mengancam akan menjatuhkan bom nuklir di Korea Utara selama Perang Korea.

Korea Utara percaya bahwa alasan diperlukannya senjata nuklir dan rudal adalah untuk memastikan bahwa AS tidak menyerang. Korea Utara merasa bahwa AS akan menyerang atau melakukan invasi terhadap negara dengan rezim yang tidak disukai, seperti yang terjadi di Irak. Jadi ada alasan defensif yang sah. Terdapat juga kepentingan yang lain seperti bargaining position, pengaruh kawasan dan kebanggaan nasional namun pada intinya adalah terdapat campuran motif dan dorongan, ofensif maupun defensif.

Pernyataan – pernyataan dari Presiden Trump juga seperti memberikan legitimasi dari upaya defensif Korea Utara. Amerika Serikat juga melakukan beberapa upaya militer yang bisa bermotif ofensif maupun desensive. Seperti menyimpan rudal terminal high-altitude area defense (THAAD) yang berfungsi untuk menembak jatuh rudal lain, Meakukan latihan bersama militer dengan Korea Selatan dan tentu saja kepemilikan senjata nuklir Amerika Serikat. Tentu saja hal tersebut menjadikan Korea Utara di bawah ancaman.

Kejadian diatas adalah salah satu keadaan dimana terjadi security dilemma anatar negara. Seperti penulis cantumkan dalam landasan teori bahwa Security Dilemma adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara lain, dalam hal ini peningkatan kapasitas militer yang dilakukan oleh Korea Utara akan menjadikan Amerika Serikat sedikit lebih tidak aman begitupun sebaliknya.

Tidak berhasilnya proses Engagement diakibatkan oleh tidak adanya ketidakpercayaan. Korea Utara tidak dapat mengetahui apakah Amerika Serikat akan menggunakan kemampuan militernya yang meningkat untuk serangan di masa depan. Karena alasan inilah Korea Utara akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuasaan. Pada akhirnya harus diterima bahwa jaminan keamanan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat tidak sebanding dengan perubahan total haluan negara yang harus dilakukan Korea Utara jika melakukan denuklirisasi.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah disampaikan peneliti dapat disimpulkan bahwa terdapat lima poin kepentingan Amerika Serikat dalam pelucutan senjata nuklir Korea utara. Pertama, Amerika Serikat Mencegah Korea Utara untuk Menggunakan Senjata Nuklir. Hal yang paling penting bagi Amerika Serikat tentu saja adalah keamanan negara dan warga negara didalamnya. Oleh sebab itu Amerika Serikat harus memastikan apapun yang terjadi di Korea Utara faktor internal maupun eksternal, senjata nuklir tidak pernah digunakan. Dalam hal ini Amerika Serikat harus mampu mengetahui secara pasti kekuatan senjata nuklir dan rudal milik Korea Utara. Amerika Serikat terus mendorong agar Korea Utara bersedia menerima perwakilan International Atomic Energy Agency (IAEA) untuk memverifikasi data senjata nuklir Korea Utara. Kedua, Amerika Serikat ingin menghentikan program nuklir dan rudal Korea Utara. Amerika Serikat adalah negara pendorong berdirinya Penjanjian Non Proliferasi Nuklir / *Non Proliferation Treaty* (NPT). Sebagai negara yang mendorong berdirinya NPT, Amerika Serikat tidak setuju dengan kepemilikan senjata nuklir Korea Utara. Bagi Amerika Serikat negara yang bisa memiliki senjata nuklir adalah negara yang berdasarkan NPT diperbolehkan, yaitu

Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris dan Prancis. Keempat, Menjaga Keamanan Nasional Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat senjata nuklir Korea Utara adalah ancaman nyata bagi keamanan nasional. Kelima, Menjaga Keamanan Sekutu Amerika Serikat di Asia Timur. Seperti diketahui bahwa Amerika Serikat memiliki sekutu yang berdekatan dengan Korea Utara, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Aliansi AS-Jepang telah lama menjadi jangkar keamanan AS di Asia sedangkan Korea Selatan adalah salah satu mitra strategis dan ekonomi terpenting Amerika Serikat di Asia. Kelima, Hegemoni Amerika Serikat di Kawasan Asia Timur. Dalam hal keamanan, Korea Utara menjadi negara yang sangat mengganggu hegemoni Amerika Serikat di Asia Timur. Korea Utara, dengan uji coba senjata nuklir dan rudal, menjadikan wilayah Asia Timur kompleks secara bidang politik dan keamanan.

Dalam upaya untuk memenuhi kepentingan nasional, Presiden Donald Trump membentuk sebuah kebijakan yang disebut *maximum pressure and engagement*. Sebuah strategi yang bertumpu dari tekanan – tekanan terhadap Korea Utara. Tekanan yang dilakukan bisa dimulai dari kata – kata ancaman, sanksi, latihan militer dan lainnya. Sedangkan *Engagement* adalah proses selanjutnya dari strategi tersebut. Engagement bisa dimulai dengan menarik Korea Utara terhadap meja perundingan yang tidak bisa ditolak karena tekanan yang sudah dilakukan di awalnya. Inti dari Engagement sendiri adalah denuklirisasi Korea Utara.

Proses *Engagement* Presiden Trump dengan Kim tampaknya tidak berhasil. Tujuan utama dari kebijakan trump tentu saja denuklirisasi. Namun sepertinya setelah pertemuan kedua presiden Trump dan Kim Jong un di Vietnam hal tersebut tidak terjadi. Adapun penulis mengasumsikan adanya keadaan *Security Dilemma* yang dihadapi Korea Utara mengenai Denuklirisasi.

Korea Utara percaya bahwa alasan diperlukannya senjata nuklir dan rudal adalah untuk memastikan bahwa AS tidak menyerang.

Korea Utara merasa bahwa AS akan menyerang atau melakukan invasi terhadap negara dengan rezim yang tidak disukai, seperti yang terjadi di Irak. Terdapat juga kepentingan yang lain seperti bargaining position, pengaruh kawasan dan kebanggaan nasional namun pada intinya adalah terdapat campuran motif dan dorongan, ofensif maupun defensif.

Pernyataan – pernyataan dari Presiden Trump juga seperti memberikan legitimasi dari upaya defensif Korea Utara. Amerika Serikat juga melakukan beberapa upaya militer yang bisa bermotif ofensif maupun desensive. Seperti menyimpan rudal *terminal high-altitude area defense* (THAAD) yang berfungsi untuk menembak jatuh rudal lain, Melakukan latihan bersama militer dengan Korea Selatan dan tentu saja kepemilikan senjata nuklir Amerika Serikat. Tentu saja hal tersebut menjadikan Korea Utara di bawah ancaman.

Kejadian diatas adalah salah satu keadaan dimana terjadi *security dilemma* antar negara. Seperti peneliti cantumkan dalam landasan teori bahwa *Security Dilemma* adalah situasi di mana tindakan yang diambil oleh negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri menimbulkan reaksi dari negara-negara lain, yang mengarah pada penurunan daripada peningkatan keamanan negara lain, dalam hal ini peningkatan kapasitas militer yang dilakukan oleh korea Utara akan menjadikan Amerika Serikat sedikit lebih tidak aman begitupun sebaliknya.

Tidak berhasilnya proses *Engagement* diakibatkan oleh tidak adanya tidak adanya keinginan untuk menjadi negara dengan kapasitas militer yang lebih kecil. Korea Utara tidak dapat mengetahui apakah Amerika Serikat akan menggunakan kemampuan militernya yang meningkat untuk serangan di masa depan. Karena alasan inilah Korea Utara akan memilih untuk meningkatkan kemampuan militer mereka sendiri untuk membangun kembali keseimbangan kekuasaan atau *balance of power*. Pada akhirnya harus diterima bahwa jaminan keamanan yang ditawarkan oleh Amerika Serikat tidak sebanding dengan perubahan total haluan negara yang harus

dilakukan Korea Utara jika melakukan denuklirisasi.

5.2 Saran

Dalam isu nuklir penting untuk mengetahui tentang motivasi, doktrin dan strategi Korea Utara dalam pengembangan senjata nuklir. Apakah korea Utara melihat program itu sebagai bagian untuk menangkal invasi dan tekanan oleh Amerika Serikat? Atau program ofensif yang berpotensi menciptakan konflik antar negara?

Peneliti beranggapan bahwa jika Korea Utara memiliki senjata nuklir untuk kepentingan ofensif maka kebijakan maximum pressure and engagement milik presiden Trump adalah cara yang tepat untuk isu senjata nuklir Korea Utara. Namun apabila senjata nuklir adalah sebagai bagian dari pertahanan Korea Utara makan perundingan apapun tanpa denuklirisasi Amerika Serikat akan berakhir gagal.

Jika Amerika Serikat tidak ingin negosiasinya gagal, maka Amerika Serika harus mulai menurunkan standar. Pelucutan senjata nuklir mungkin adalah hal terakhir yang akan dilakukan Korea Utara, maka dari itu Amerika Serikat harus mengupayakan hal lain dalam perundingan. Amerika Serikat bisa memulai dengan memaksa Korea Utara menerima kembali pengawas dari Badan Atom Internasional / *International Atomic Energy Agency* (IAEA). Hal lain yang bisa ditawarkan juga adalah penghentian uji coba rudal di wilayah negara lain. Perpanjangan Moratorium fasilitas nuklir juga bisa menjadi hal yang diperjuangkan Amerika Serikat dalam meja perundingan.

Dalam perundingan Amerika Serikat juga harus segera memikirkan imbalan yang setimpal bagi Korea Utara. Moratorium fasilitas nuklir haruslah seger direspon dengan menghilangkan beberapa sanksi terhadap Korea Utara. Agar diterimanya IAEA di Korea Utara dan juga berhentinya uji coba rudal maka Amerika Serikat haruslah mampu untuk memberhentikan latihan militer dengan Korea Selatan dan mengambil THAAD dari Korea Selatan.

Salah satu aspek penting dalam isu senjata nuklir adalah pengembangan rudal. Dalam hal tersebut peneliti tidak bisa menyampaikan dengan baik mengenai pengembangan rudal. Jika peneliti selanjutnya hendak melakukan penelitian mengenai isu senjata nuklir di negara manapun, maka peneliti menyarankan agar memperdalam pembahasan mengenai rudal. Rudal merupakan aspek penting dalam isu senjata nuklir karena rudal sebagai senjata pengirim adalah jembatan bagi ancaman di satu negara terhadap negara lain.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Banyu Perwita, Anak Agung dan Yantan, Mochamad Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Goldstein, Joshua dan Pevehouse, Jon. 2012. *International Relations*. United States: Pearson.
- Hudson, Valerie M. 2008. *The History and Evolution of Foreign Policy Analysis*. Oxford: Oxford University Press.
- Ikbar, Yanuar. 2014. *Metodologi dan Teori Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori dan Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mazaar, M. J. 1955. *North Korea and the Bomb: A Case Study in Nonproliferation*. London: Macmillan Press.
- Pinkston, Daniel A. 2008. *The North Korean Ballistic Missile Program*. USA: Strategic Studies Institute.
- Priangani, Ade. 2014. *Politik Luar Negeri Indonesia*. Bandung: FISIP UNPAS Press.
- Rudy, T. May. 2011. *Hubungan Internasional Kontemporer dan Masalah-masalah Global*. Bandung: Revika Aditama.
- Yani, Montratama dan Wahyudin. 2017. *Pengantar Studi Keamanan*. Malang: Intrans Publishing.

C. Dokumen

2017. *National Security Strategy of the United States of America*.
2018. *National Strategy for Countering Weapons of Mass Destruction Terrorism*.
- Allison, Graham. 2010. *America's National Interest*. Harvard University.
- Snyder, Jack; Mansfield, Edward. 2002. *Democratic Transitions, Institutional Strength, and War*. International Organization. 56 (2): 297–337.

D. Rujukan Elektronik

- Arms Control Association. 2018. Nuclear Weapons: Who Has What at a Glance. Melalui [https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat\[7/5/2019\]](https://www.armscontrol.org/factsheets/Nuclearweaponswhohaswhat[7/5/2019])
- Arms Control Association. 2018. Arms Control and Proliferation Profile: North Korea. Melalui [https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile\[1/3/2019\]](https://www.armscontrol.org/factsheets/northkoreaprofile[1/3/2019]).
- Blumenthal, Daniel. 2018. Give 'Maximum Pressure' a Chance. Melalui [https://foreignpolicy.com/2018/02/15/maximum-pressure-needs-more-time-trump-pence-united-states-north-korea/\[13/7/2019\]](https://foreignpolicy.com/2018/02/15/maximum-pressure-needs-more-time-trump-pence-united-states-north-korea/[13/7/2019])
- Boghani, Priyanka. 2019. The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline. Melalui [https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/\[20/3/2019\]](https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/[20/3/2019]).
- Boghani, Priyanka. 2019. The U.S. and North Korea On The Brink: A Timeline. Melalui [https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/\[13/7/2019\]](https://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-u-s-and-north-korea-on-the-brink-a-timeline/[13/7/2019]).
- Choe Sang-Hun & Steven Lee Myers. 2012. North Korea Says It Will Launch Satellite Into Orbit. Melalui [http://www.nytimes.com/2012/03/17/world/asia/north-korea-satellite-launch-missile-test.html\[11/3/2019\]](http://www.nytimes.com/2012/03/17/world/asia/north-korea-satellite-launch-missile-test.html[11/3/2019]).
- CNN Library. 2019. North Korea Nuclear Timeline Fast Facts. Melalui

- <https://edition.cnn.com/2013/10/29/world/asia/north-korea-nuclear-timeline---fast-facts/index.html>[1/3/2019].
- Erickson, Amanda. 2017. A timeline of North Korea's five nuclear tests and how the U.S. has responded. Melalui https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/04/14/a-timeline-of-north-koreas-five-nuclear-tests-and-how-the-u-s-has-responded/?noredirect=on&utm_term=.f3a31c481f14[11/3/2019].
- Hecker, Siegfried. 2018. Why did Kim Jong Un blow up his nuclear test site?. Melalui https://www.washingtonpost.com/news/theworldpost/wp/2018/05/30/north-korea-test-site/?noredirect=on&utm_term=.b43d7ad6ab1[14/7/2019].
- <https://www.apnews.com/86626d21ea2b45c79457a873a747c452> [12/7/2019].
- <https://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/pages/nkorea.aspx> [3/3/2019].
- International Atomic Energy Agency. 2002. IAEA Inspectors to leave North Korea. Melalui <https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/iaea-inspectors-leave-north-korea>[7/3/2019].
- Klingner. 2018. Why Does North Korea Want Nukes?. Melalui <https://www.heritage.org/insider/summer-2018-insider/why-does-north-korea-want-nukes>[24/6/2019].
- Lewis, Jeffrey. 2018. The Word That Could Help the World Avoid Nuclear War. Melalui <https://www.nytimes.com/2018/04/04/opinion/avoid-nuclear-war-denuclearization.html>[8/5/2019]
- Pennington, Matthew. 2017. Trump strategy on NKorea: 'Maximum pressure and engagement'. Melalui
- Putra, Zaki Haryadi. 2007. Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara. Melalui <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-s1-2007-zakiharyad-6732&q=korea%20utara>[12/3/2019].
- Schumacher, Elizabeth. 2018. From Little Rocket Man to denuclearization: A timeline of US-North Korea relations under Kim Jong Un. Melalui <https://www.dw.com/en/from-little-rocket-man-to-denuclearization-a-timeline-of-us-north-korea-relations-under-kim-jong-un/a-43729095> diakses pada [14/7/2019].
- Siboro, Lamsinar Septian. 2018. Cyber Warfare Antara Amerika Serikat Dan Korea Utara Dalam Kasus Film The Interview Oleh Sony Pictures Entertainment. Melalui <https://elib.unikom.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptunikompp-gdl-lamsinarse-39360&q=korea%20utara>[12/3/2019].
- U.S. Department of States. 2016. About the U.S. Department of States. Melalui <https://www.state.gov/about/about-the-u-s-department-of-state/>[22/6/2019].